Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 24, No 3 (2024): Oktober, 2954-2958
DOI: 10.33087/jiubj.v24i3.5727

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pengeluaran Bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang Tahun 2007-2021

Moch Erik Nugroho, Ignatia Martha Hendrati
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN "Veteran" Jawa Timur
Correspondence: 18011010111@student.upnjatim.ac.id, ignatia.hendrati.ep@upnjatim.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh pendapatan asli suatu daerah, dana perimbangan serta pengeluaran bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Jombang selama periode 2007 – 2021. Memakai metode regresi linear berganda dengan melakukan uji Best Linear Unbiased Estimaion (BLUE), dan analisis uji hipotesis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Jombang selama periode 2007-2021 dipengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pengeluaran di bidang Kesehatan. Namun secara parsial hanya dana perimbangan yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jombang selama periode 2007-2021.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, indeks pengembangan manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Bidang Kesehatan

Abstract. *The aim of the research is to analyze the influence of a region's original income, balancing funds and health expenditure on the human development index (HDI) in Jombang Regency during the period 2007 - 2021. Using the multiple linear regression method by carrying out the Best Linear Unbiased Estimation (BLUE) test, and analysis hypothesis testing. The results of this research concluded that simultaneously the human development index (HDI) in Jombang Regency during the 2007-2021 period was influenced by local original income (PAD), balancing funds and expenditure in the health sector. However, only partial balancing funds can influence the human development index in Jombang Regency during the 2007-2021 period.*

Keywords: *Equalization Fund; HDI; Health Sector Expenditure; Local Revenue*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah tersusun berbagai macam sumber keuangan yang diperoleh dalam suatu daerah. sumber penyusun pendapatan tersebut meliputi pajak serta retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan juga penggelolaan kekayaan daerah. Dalam melakukan penghimpunan dana dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan berpatokan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004, sampai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 bahwa pendapatan tersebut harus dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran pemerintah.

Pendapat Mongan (2019) kebijakan pemerintah dapat digambarkan dengan besaran anggaran yang dikeluarkan dalam menetapkan kebijakan tersebut tentu tidak lepas dari biaya yang digunakan dan bersumber dari anggaran pemerintah. Dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan menunjukkan pemerintah telah berkomitmen permasalahan di setiap bidang, dengan adanya hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tiap tahunnya. Pengeluaran terkait bidang kesehatan merupakan salah satu pengeluaran pemerintah daerah. besaran dalam upaya peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat besaran belanja pemerintah pusat atau daerah penetapannya berlandaskan UU Nomor 36 tahun 2009 disebutkan dana yang dikeluarkan pemerintah pusat sekitar 5% dari APBN diluar gaji, sedangkan oleh pemerintah daerah sekitar 10% dari APBD diluar gaji (Rahim dkk, 2021).

Pencapaian yang berkesinambungan fiscal (*fiscal sustainability*) dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah pusat membuat mekanisme transfer dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan nama desentralisasi fiskal dan dikaitkan dengan

kebijakan keuangan negara. Kebijakan ini menyamaratakan kemampuan keuangan antar daerah yang terkait dan sesuai dengan kebijakan otonomi masing-masing daerah (Sun`an & Senuk, 2015). Dalam penerapan *fiscal sustainability* terjadi perubahan struktur keuangan. pertama, berupa Penerimaan daerah dari sumber daya yang tersedi di alam seperti perikanan dan perhutanan. Kedua, berupa Penerimaan daerah berupa bagi hasil pajak yang sumber dananya perolehan hak tanah atas bangunan serta pajak bumi dan bangunan , dan ketiga, mekanisme transfer yang sebelumnya subsidi daerah otonom menjadi dana alokasi umum (Ali & Maisyuri, 2017).

Berjalanya otonomi daerah dapat menimbulkan ketimpangan dimana besaran pendapatan antar daerah tidak sama hal ini dapat diatasi dengan munculnya kebijakan desentralisasi fiskal. kebijakan tersebut merupakan transfer dari pemerintah pusat menuju daerah. dana tersebut dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan suatu daerah. dana tersebut dikenal dengan nama dana perimbangan. dengan tujuan mengatasi kelebihan pengeluaran dalam suatu daerah. besarnya penerimaan dana perimbangan dalam mengelola keuangan daerah tersebut mencerminkan kemampuan keuangannya. Tingginya jumlah dana perimbangan yang diterima sauatu daerah menunjukkan tingkat ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat hal ini menunjukkan rendahnya kinerja keuangan daerah sehingga daerah perlu mengali lagi potensi-potensi yang berada didaerahnya (Putri & Darmayanti, 2019).

Dalam melakukan pembangunan daerah memerlukan biaya yang salah satunya dibiayai oleh pendapatan asli daerah. hal tersebut dapat digunakan untuk membiayai upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Indeks pembanguanan manusia merupakan salah satu tolak ukurnya, dan dalam mengukur keberhasilan tersebut dapat dilakukan dengan melihat 3 dimensi yang meliputi dimensi indeks umur panjang serta kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat.. Dengan masing-masing perbedaan metode di setiap dimensinya (Sulastri, 2021).

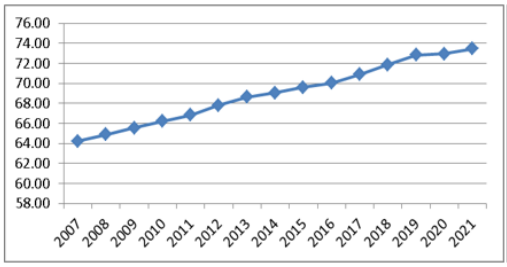

Gambar 1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang Tahun 2007 – 2021

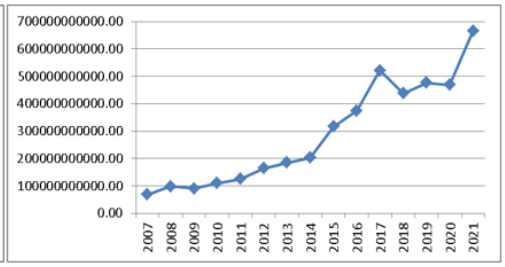

Gambar 2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007-2021

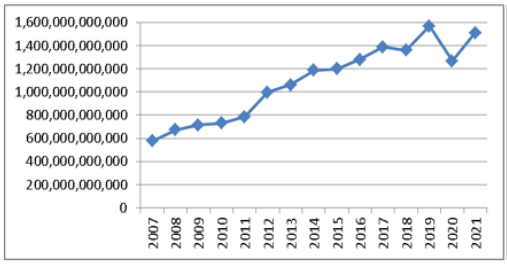

Gambar 3
Dana Perimbangan Kabupaten Jombang Tahun 2007-2021

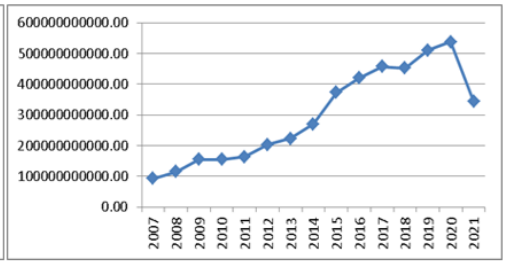

Gambar 4
Pengeluaran Bidang Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2007-2021

Sumber : data olahan

Gambar 1 menjelaskan selama periode 2007-2021 IPM Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Pada 2021 Kabupaten Jombang telah mencapai IPM sebesar 73,45 yang merupakan pencapaian tertinggi, dan jika dirata-ratakan selama periode 2010-2021 mengalami kenaikan sebesar 0,66 (BPS Kabupaten Jombang, 2022). Sedangkan Gambar 2 menunjukkan PAD Kabupaten Jombang selama periode 2007-2021 terus mengalami peningkatan, namun besaran PAD Kabupaten Jombang pada tahun 2018 dan 2020 sempat

mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 438.197.175,44 dan Rp 468.627.918,7 dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 665.871.436,38.

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan besaran dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang tahun 2007 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan pada tahun 2007 besaran yang didapat Rp 575.680.616.375 dan pada tahun 2019 Rp 1,567,421,101,751; hal ini menunjukkan pemerintah daerah memerlukan sejumlah dana yang digunakan untuk mengelola daerahnya setiap tahun. Pada tahun 2020 dana perimbangan yang diterima mengalami penurunan menjadi Rp 1,265,246,900,240 dan pada tahun 2021 dana perimbangan kembali naik sebesar Rp 1.510.656.256,87. Sedangkan pada Gambar 4 menunjukkan bahwa besaran dana yang digunakan dalam pengeluaran bidang kesehatan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2007 sampai tahun 2020 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 yang dimana besaran penurunan tersebut sangat curam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD serta dana perimbangan dan juga pengeluaran bidang kesehatan terhadap IPM di Kabupaten Jombang selama periode 2007-2021.

METODE

Objek penelitian ini meliputi IPM, PAD, Dana Perimbangan dan Pengeluaran bidang kesehatan yang berupa data sekunder dan berasal dari BPS, Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI, dan BPKAD Kabupaten Jombang. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data IPM, realisasi pendapatan daerah, pengeluaran bidang kesehatan dengan rentang selama periode 2007-2021. Memakai metode regresi linear berganda degan melakukan *uji Best Linear Unbiased Estimaion* (BLUE), analisis statistik deskriftif dan uji hipotesis. Model persamaan dalam penelitian ini adalah:

$Y = \alpha + \beta1.X1 + \beta2.X2 + \beta3.X3 + \varepsilon$

Keterangan : Y = Indeks Pembangunan Manusia; X1 = Pendapatan Asli Daerah; X2 = Dana Perimbangan; X3 = Pengeluaran Bidang Kesehatan; α = *constant*; $\beta1$, $\beta2$, $\beta3$ = *coefficient*; dan ε = *Error term.*

HASIL

Tabel 1
Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. error	Beta		
Const.	H1.160	.501		2.318	.041
PAD	2.000E-12	.000	1.023	1.622	.133
Dana Perimbangan	-1.626E-12	.000	-1.408	-1.957	.076
Pengeluaran Bidang Kesehatan	1.831E-12	.000	.746	1.349	.204

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh bahwa variabel PAD: Sig. 0.133 > 0,05; Dana Perimbangan: Sig. 0,076 > 0,05; dan Pengeluaran Bidang Kesehatan: Sig. 0.204 > 0,05. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 dalam uji heteroskedastisitas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Berdasarkan Tabel 2 pengujian diketahui Asymp Sig (2-tailed) 0,290 berarti lolos autokorelasi. Jika nilai asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2016).

Tabel 2
Hasil Pengujian Autokorelasi *RunTest*

	Unstandardized Residual
Test Value	.15893
Cases < Test Value	7
Cases >= Test Value	8
Total Cases	15
Number of Runs	6
Z	-1.059
Asymp. Sig (2-tailed)	.290

Sumber : data olahan

Tabel 3
Hasil Pengujian Multikoleniaritas

Model	Statistics	
	Collinearty Tolerance	VIF
PAD	.145	6.902
Dana Perimbangan	.111	8.982
Pengeluaran Bidang Kesehatan	.189	5.302

Sumber : data olahan

Tabel 3 diketahui suatu nilai toleransi dan *Variance Inflaction Factor* (VIF) tiap variabel adalah sebagai berikut: variabel PAD (X1): nilai toleransi 0,145 > 0,10 dan *Variance Inflaction Factor* 6,902 < 10,0; variabel Dana Perimbangan (X2): nilai toleransi 0,111 > 0,10 dan *Variance Inflaction Factor* 8,982 < 10,0; dan variabel Pengeluaran Bidang Kesehatan (X3): nilai toleransi 0,189 > 0,10 dan *Variance Inflaction Factor* 5,302 < 10,0. Jika nilai VIF < 10 atau nilai *Tolerance* > 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. (Ghozali, 2016).

Tabel 4
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.977	.954	.942	.73414	1.139

Sumber : data olahan

Tabel 4 koefisien determinasi bernilai 0,954 berarti variabel PAD, dana perimbangan, serta pengeluaran bidang kesehatan berpengaruh terhadap IPM sebanyak 95,4% dan 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar pengujian.

Tabel 5
Hasil Pengujian Anova

Model	Sum of squares	df1	Mean square	F	Sig.
Regression	123.413	3	41.138	76.328	.000
Residual	5.929	11	.539		
Total	129.341	14			

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan nilai F Hitung nilainya sebesar 76,328 > F tabel 3,49. Hal ini dapat menunjukkan adanya pengaruh variabel PAD, dana perimbangan serta pengeluaran bidang kesehatan kepada indeks pembangunan manusia. Tabel 6 juga diperoleh persamaan regresi linear berganda model penelitian ini, yaitu: Y = 61.376 + 4.855 + 4.491 + 4.509 + e. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa (1) nilai konstanta positif dengan sebesar 61.376 yang memiliki arti variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pengeluaran bidang kesehatan jika tidak mengalami kenaikan maka pada variabel indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 61.376; (2) koefisien variabel PAD memiliki nilai positif dengan besar 4.855 yang berarti pada setiap kenaikan 1 point variabel PAD menyebabkan variabel indeks pembangunan manusia naik senilai 4.855 dengan catatan variabel lain nialinya tetap atau konstan; (3) koefisian variabel dana perimbangan bernilai positif dengan nilai 7,322 yang berarti pada setiap kenaikan 1 point variabel dana perimbangan menyebabkan variabel indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 7,322 dengan catatan varibel lainnya bernilai tetap atau konstan; dan (4) Koefisien dari variabel pengeluaran bidang kesehatan bernilai positif dengan nilai 4.509 yang berarti pada setiap kenaikan 1 point variabel pengeluaran bidang kesehatan menyebabkan varibel indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan sebesar 4.509 dengan catatan variabel lainnya bernilai tetap atau konstan.

Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. error	Beta		
Const.	61.376	1.094		56.079	.000
PAD	4.844E-12	.000	.305	1.800	.099
Dana Perimbangan	4.491E-12	.000	.478	2.472	.031
Pengeluaran Bidang Kesehatan	4.509E-12	.000	.226	1.519	.157

Sumber : data olahan

Tabel 6 menjelaskan bahwa (1) t-hitung pendapatan asli daerah bernilai 1,800 < 2,201 menunjukkan indeks pembangunan manusia tidak dipengaruhi variabel tersebut; ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah yang rendah akan berpengaruh pada tingkat kemandirian suatu daerah yang masih rendah. Rendahnya pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang akan berpengaruh pada pembiayaian kegiatan perekonomian daerah; (2) t-hitung dana perimbangan 2,472 > 2,201 menunjukkan indeks pembangunan manusia dipengaruhi variabel tersebut; hal ini disebabkan oleh tingginya besaran dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Jombang ditambah lagi dengan pengelolaan dana yang didapatkan oleh pemerintah daerah mampu dialokasikan kepada sektor-sektor publik yang berperan dalam meningkatkan indeks pembanguna manusia sehingga memiliki peran yang besar; dan (3) t-hitung pengeluaran pada bidang kesehatan 1,519 < 2,201 yang menunjukkan indeks pembangunan manusia tidak dipengaruhi oleh variabel tersebut; hal ini disebabkan rendahnya dana yang diterima, dan banyaknya permasalahan kesehatan yang perlu diselesaikan menjadikan penggunaan dana yang tersedia belum mampu dioptimalkan, dan anggaran kesehatan tiap tahunnya tidak selalu mengalami peningkatan di Kabupaten Jombang selama periode 2007-2021.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Jombang selama periode 2007-2021 dipengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pengeluaran di bidang Kesehatan. Namun secara parsial hanya dana perimbangan yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jombang selama periode 2007-2021.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M., & Maisyuri. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, *3*(1), 41–56.

BPS Kabupaten Jombang, 2022. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2007-2021*, diakses melalui website https://jombangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/indeks-pembangunan-manusia.html

Ghozali, I. 2016, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mongan, J. J. S. 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 31–42.

Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. 2019. Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *8*(5), 2834.

Rahim, A., Sutanty, M., & Anggita, P. 2021. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Ipm Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, *18*(3), 276–284.

Sun`an, M., & Senuk, A. 2015. *Ekonomi Pembangunan Daerah.* Mitra Wicana Media, Jakarta.

Sulastri, E. 2021. View of Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Seluruh Provinsi di Kalimantan Tahun Anggaran 2015-2019). *Riset Manaemen Dan Bisnis*, *6*, 134–145.